

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN
(Studi Pada Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa)

The Effect Of The Implementation Of Development Planning Delibrations
(A Study In Mapin Rea Village, Alas Barat District, Sumbawa Regency)



JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
(STUDI DI DESA MAPIN REA KECAMATAN ALAS BARAT
KABUPATEN SUMBAWA)**

Oleh:

LENNYAPRIANINGSIH

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi
Tanggal 15 Februari 2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Pembimbing II



Yodhi Lesmana, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui,

Ketua Prodi Program Administrasi Publik



Yusuf Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
(STUDI DI DESA MAPIN REA KECAMATAN ALAS BARAT
KABUPATEN SUMBAWA)

Oleh:

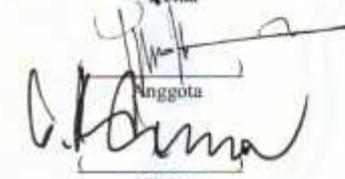
LENNY APRIANINGSIH
NIM. 217110077

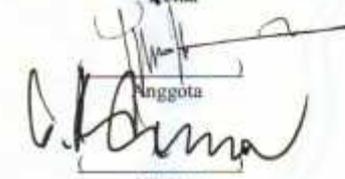
Telah dipertahankan didepan peguji
Pada tanggal 15 Februari 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M. Si**
NIDN.0806066801
2. **Yudhi Lestanata, S. IP, M. IP**
NIDN.0827118801
3. **Drs. H. Abdurrahman, M. M**
NIDN.0804116101


Ketua


Anggota


Anggota

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik


✓ **Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP**
NIDN: 0822048901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali Ikhsan, M.Si
NIDN. 0806066801



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 15 Februari 2021
Mahasiswa,


LENNY APRIANINGSIH
217110077



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: LENNY APRIANINGSIH
NIM: 217110077
Tempat/Tgl. Lahir: Mapin Rea 8 April 1999
Program Studi: Adm. Publik
Fakultas: Fisipol
No. Hp/Email: _____
Judul Penelitian: -

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI DESA MAPIN REA
KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 4/5

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di Mataram

Pada tanggal 15 Februari 2021

Penulis



LENNY APRIANINGSIH
NIM: 217110077

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Ikhlas, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp: 0370 - 633723 Fax: 0370-641906
Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama LENNY APRIANINGSIH
NIM 217110077
Tempat/Tgl Lahir Matin Rea, 08 April 1999
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Fisipol
No. Hp/Email _____
Jenis Penelitian Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI DESA MADIN REA
KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di Mataram
Pada tanggal 15 Februari 2021

Penulis


LENNY APRIANINGSIH
NIM 217110077

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


Kkandar, S.Sos, M.A.
NIDN 0802048904

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya, saudara saya dan orang-orang tersayang disekeliling saya.



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini tidak mungkin terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si selaku pembimbing utama dalam penulisan proposal skripsi ini.
5. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP selaku pembimbing pendamping dalam penulisan proposal skripsi ini.
6. Kedua orangtua saya ayah A. Rahman dan ibu saya Ranti yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan yang tak henti-hentinya.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2017.
8. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Mataram, 15 Februari 2021

KATA PENGANTAR

Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun skripsi, peneliti sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. maka dari itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram 15 Februari 2021

Penulis

LENNY APRIANINGSIH
217110077

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
(STUDI PADA DESA MAPIN REA KECAMATAN ALAS BARAT
KABUPATEN SUMBAWA)**

Lenny Aprianingsih¹, Muhammad Ali², Yudhi Lestanata³
Mahasiswa¹, Pembimbing Utama², Pembimbing Pendamping³
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. Informan dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang penduduk asli Desa Mapin Rea yang antara lain merupakan Kepala Desa, Staf Desa, Kepala Urusan Perencanaan dan masyarakat desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu: 1. Secara primer yaitu menggunakan observasi, wawancara dokumentasi dan 2. Secara sekunder yaitu dengan kajian pustaka melalui buku, jurnal skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penulis. Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa teori ialah teori tentang efektivitas, dan Musrenbang

Hasil penelitian ini diketahui bahwa pencapaian tujuan dari pelaksanaan Musrenbang sudah tercapai yaitu skala prioritasnya dan paprtisipasi masyarakat yang cukup tinggi menjadi pendukung dari tercapainya tujuan tersebut. Pihak pemerintah juga melakukan berbagai cara untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk memberikan usulan atau aspirasinya dengan menjaga komunikasi dengan baik pada masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perumpuan guna untuk meningkatkan kerja sama yang baik meningkatkan pembangunan di Desa Mapin Rea.

Kata kunci: Efektivitas, Musrenbang

THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT PLANNING
DELIBERATIONS (A STUDY IN MAPIN REA VILLAGE ALAS BARAT
DISTRICT, SUMBAWA REGENCY)

Lenny Aprianingsih¹, Muhammad Ali², Yudhi Lestana³
Student 1, Principal Advisor 2, Co-Advisor 3

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah Mataram University

ABSTRACT

This study aims to determine the effect and factors that affect the implementation of development planning deliberations in Mapin Rea Village, Alas Barat District, Sumbawa Regency. The respondents in this study were 4 (four) native of Mapin Rea Village, including the Village Head, Village Staff, Head of Planning Affairs, and the community of Mapin Rea Village, Alas Barat District. This research uses qualitative research methods by using two data collection methods, namely: 1. The primary data using observation, interview documentation, and 2. The literature review secondary data through books, thesis journals, annual reports, and internet sites related to its title. In the preparation of this thesis, there are several theories, namely the theory of effectiveness, and Musrenbang.

This study shows that the achievement of the objectives of the implementation of Musrenbang has been achieved, namely the priority scale and high community participation to support the achievement of these goals. The government has also taken various ways to increase community participation in providing suggestions or aspirations by maintaining good communication with the community, youth leaders, religious leaders and community leaders to increase good cooperation to increase development in Mapin Rea Village.

Keywords: Effectiveness, Musrenbang



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIATRISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
ABSTRAK	ix
SUMARY	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori.....	15
2.2.1. Definisi Efektivitas	15
2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	17
2.2.3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pembangunan	18
2.2.4. Kriteria Efektivitas	18
2.2.5. Definisi Pembangunan.....	20
2.2.6. Definisi Perencanaan Pembangunan	25

2.2.7. Definisi Musrenbang	28
2.2.8. Keluaran.....	30
2.2.9. Partisipasi Masyarakat	30
2.3. Kerangka Berfikir.....	31
2.3.1. Definisi Konseptual.....	32
2.3.2. Definisi Operasional.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Lokasi Penelitian.....	36
3.3. Teknik Penentuan Informan.....	36
3.4. Jenis dan Sumber Data	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6. Analisis Data	37
3.7. Uji Validasi.	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
4.1.1 Desa Mapin Rea	41
4.1.1.1 Pemerintah Desa Mapin Rea.....	42
4.1.1.2 Kependudukan Desa Mapin Rea.....	43
4.1.1.3 Pendidikan Masyarakat Desa Mapin Rea	44
4.1.1.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Mapin Rea.....	46
4.2. Aspek Efektivitas	48
4.2.1. Pencapaian Tujuan	48
4.2.1.1. Waktu Pelaksanaan	50
4.2.1.2. Sasaran	52
4.2.2. Integritas.....	54
4.2.2.1. Sosialisasi.....	56
4.2.2.2. Komunikasi	58

4.2.3. Adaptasi	60
4.2.3.1. Kesesuaian Program Dengan Lingkungan	61
4.2.3.2. Program Sesuai Kebutuhan Masyarakat	63
4.3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas.....	65
4.3.1. Peran Pendamping.....	65
4.3.1.1. Intensifitas Membantu Kelompok Sasaran	67
4.3.1.2. Kualitas Mengidentifikasi	68
4.3.2. Partisipasi Masyarakat	70
4.3.2.1. Peran Aktif Dalam Rapat	72
4.3.2.2. Keefektifan Dalam Rapat.....	74
4.3.3. Kemampuan Kelompok Sasaran	76
4.3.3.1. Kualitas Kelompok Sasaran	78
4.3.3.2. Pendidikan.....	79
BAB V PENUTUP.....	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Luas Wilayah	42
Tabel 4.1.1.2 Jumlah Penduduk	44
Tabel 4.1.1.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	45
Tabel 4.1.1.4 Mata Pencaharian	46
Tabel 4.2.1 Draf Prioritas Pembangunan Desa	50
Tabel 4.2.1.1 Jadwal Pelaksanaan Musrenbang.....	52
Tabel 4.2.1.2 Sasaran Musrenbang	54
Tabel 4.2.2 Bentuk Integritas	55
Tabel 4.2.2.1 Sosialisasi.....	57
Tabel 4.2.2.2 Media Komunikasi.....	59
Tabel 4.2.3 Bentuk Adaptasi.....	61
Tabel 4.2.3.1 Kesesuaian Program.....	63
Tabel 4.2.3.2 Kesesuaian Program.....	65
Tabel 4.3.1 Pendamping.....	67
Tabel 4.3.1.1 Intensifitas Pendamping.....	68
Tabel 4.3.1.2 Kemampuan Masyarakat.....	70
Tabel 4.3.2 Daftar Peserta Musrenbang.....	72
Tabel 4.3.2.1 Daftar Usulan	74
Tabel 4.3.2.2 Daftar Usulan	76
Tabel 4.3.3 Kemampuan Masyarakat.....	78
Tabel 4.3.3.1 Kemampuan Masyarakat.....	79
Tabel 4.3.3.2 Tingkat Pendidikan	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2001 terjadi perubahan sistem pemerintahan yang cukup drastis, yaitu dengan diterapkannya sistem otonomi daerah pelaksanaan otonomi daerah tersebut, sistem perencanaan pembangunan yang berlaku di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut dikukuhkan dengan keluarnya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN 2004). Dalam SPPN 2004 ini daerah diberikan wewenang untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Untuk mendukung pelaksanaan sistem perencanaan tersebut, pemerintah juga memberikan keluasaan bagi desa untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sejak saat itu, peran perencanaan pembangunan daerah menjadi semakin tertinggi dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah di Indonesia dan sekaligus juga dalam meningkatkan kontribusi daerah terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku atau antar individu dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang

digunakan sebagai wadah dalam penyusunan rencana pembangunan Nasional, baik Pusat maupun Daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Pelaksanaan pembangunan nasional, baik di pusat dan daerah didasarkan demokrasi dan partisipasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan Kesatuan Nasional.

Kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan kreasi yang lahir dari dasar kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mutlak perlu sesuai dengan hakikat pembangunan yang pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan mendapatkan arahan, bimbingan dan bantuan serta pengawasan dari pemerintah. Meskipun peluang dan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, cukup terbuka luas namun sebagian masyarakat kurang memahami makna di untuk berpartisipasi langsung dalam perumusan dan penyusunan perencanaan. Bahkan sering terjadi perubahan-perubahan kelembagaan partisipatif masyarakat di desa/ Kelurahan, seperti dari LKMD (lembaga ketahanan masyarakat desa) berubah menjadi LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) tidak dilakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga orang-orang tertentu saja yang dapat memahami kondisi Perubahan tersebut, Disamping itu tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat dalam mekanisme perencanaan pembangunan juga masih sangat kurang (Dirga, 2018:2)

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa Musrenbang tersebut ada dilakukan oleh Bappeda setempat secara berkala

sebelum memfinalkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, pada satu pihak, pelaksanaannya terkesan banyak bersifat seremonial dan formalitas saja dan tidak banyak kritikan serta masukan masyarakat diakomodasi dalam perbaikan rencana. Sedangkan di pihak lain, para tokoh masyarakat sendiri juga kurang serius memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam Musrenbang tersebut tersebut. Kondisi terlihat dari kurang banyaknya tanggapan masyarakat terhadap konsep perencanaan yang disampaikan dan masukan serta kritikan tersebut juga kurang konkret dan bermanfaat (Sjafrisal,2014:135).

Proses pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa tidak hanya menjawab persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Namun juga menjawab permasalahan yang dihadapi dalam konteks Provinsi dan Nasional. Dalam pembangunan daerah yang telah dimulai dari penyusunan rencana, yang dijabarkan dari kabupaten Sumbawa 2016- 2021, kemudian dapat diselaraskan dengan tema pembangunan provinsi dan nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa fokuskan 5 Prioritas pembangunan daerah hal tersebut mengemukakan pada acara musyawarah rancangan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 yaitu: pertama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemantapan pelayanan dasar dan pengurangan Angka kemiskinan, dengan sasaran yang hendak dicapai meningkatkannya rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, penurunan kasus balita gizi buruk termasuk stunting, cakupan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan menurunnya angka

kemiskinan serta pengangguran terbuka. Kedua, pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah dengan sasaran utama meningkatnya rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap, meningkatnya cakupan layanan air bersih perkotaan dan pedesaan, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, peningkatan kondisi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik. Ketiga, pengembangan pariwisata, kebudayaan dan lingkungan hidup dengan sasaran utama meningkatnya kunjungan wisatawan, terkelolanya situs cagar budaya secara lebih baik dan meningkatnya rasio sampah tertangani. Keempat, pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan kapasitas UMKM dan Realisasi investasi dengan sasaran meningkatnya produktivitas komoditi unggulan seperti padi, jagung, sapi, kerbau, kopi, rumput laut, perikanan tangkap dan produk olahan hasil perikanan, terjadinya pertumbuhan wirausaha dan meningkatnya investasi daerah. Dan kelima peningkatan pelayanan publik dan inovasi melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan desa dengan sasaran utama peningkatan pelayanan kependudukan dan pemanfaatan data dan informasi, semakin berkembangnya penerapan e-government, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kualitas perencanaan pembangunan, perbaikan pengelolaan aset daerah, peningkatan persentase desa mandiri, jumlah BumDes, dan menurunnya desa rawan pangan (kabarsumbawa.com) Diakses pada pukul 10.50 pada tanggal 8 Desember 2020).

Dari permasalahan perencanaan pembangunan yang terjadi, termasuk pemerintah kabupaten Sumbawa yang berupaya untuk meningkatkan

pembangunan baik di kota maupun di daerah pedesaan. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten dari 10 Kabupaten yang berada di provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa memiliki sebanyak 24 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 157 desa (Id.m.wikipedia.org) diakses pada pukul 9.25 pada tanggal 8 Desember 2020). Penyebaran penduduk di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan setiap tahunnya dilihat dari tahun 2014-2018 jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan sebanyak 17.198 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan sebanyak 457.671 jiwa (sumbawakab.bps.go.id) diakses pada pukul 9.42 pada tanggal 8 Desember 2020).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, tidak dapat dipungkiri banyak terjadi permasalahan pembangunan Kabupaten Sumbawa. Baik infrastrukturnya, kesehatan, pendidikan, sosial serta permasalahan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa tahun 2018 mencapai 63,76 ribu jiwa. Angka tersebut turun menjadi 4,93 jiwa atau 1,23 % dari tahun sebelumnya 2017 sebesar 68,69 ribu jiwa, akan tetapi penurunan tersebut masih belum bisa mencapai target pemerintah Daerah sebesar 2 %. (sumbawakab.bps.go.id) diakses pada pukul 11.19 pada tanggal 8 Desember 2020).

Dari data usulan rekapitulasi Musrenbang kecamatan desa Mapin Rea pada tahun 2018 ada 8 usulan yang terdaftar yaitu dari RW 01 memiliki 7 usulan, jaringan perpipaan air bersih, pembangunan gedung sekolah, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan turap/talud/perkuatan tebing, pengadaan alat pertanian,

pengadaan bibit jagung, rehabilitas bangunan gedung sekolah dan dari RW 02 usulannya rehabilitasi jaringan irigasi. Kemudian di tahun 2019 ada empat usulan yang terdaftar yaitu dari RW 01 memiliki 2 usulan, pertama pelatihan/penyuluhan kependudukan, kedua pembangunan jalan. Dari RW 02 hanya ada 1 usulan pembangunan jaringan irigasi tersier dan dari RW 03 Rehabilitasi bangunan sekolah.(simrenda.sumbawakab.go.id) diakses pada pukul 12.20 pada tanggal 8 Desember 2020).

Dari banyak permasalahan desa dengan kategori desa tertinggal bukan berarti pemerintah kabupaten Sumbawa hanya memperhatikan pada pembangunan desa hanya dari penetapan dari pihak pemerintah itu sendiri tetapi pemerintah juga memberikan forum untuk masyarakat dapat memberikan partisipasi mengenai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri yang dapat diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari hasil Musrenbang ini pemerintah dapat mengetahui apa saja kebutuhan dari masyarakatnya. Salah satunya di Desa Mapin Rea, yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Desa ini memiliki 4 Dusun dan 24 Rt serta 8 Rw, dengan luas 50.16 km². Desa ini memiliki jumlah penduduk 3.124 jiwa dengan mayoritas penduduk yang bermata pencarian yang beragam yaitu petani, wiraswata, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, polisi, dan tukang kayu. (sumbawakab.bps.go.id) diakses pada pukul 13.00 pada tanggal 8 Desember 2020).

Dari data yang di dapatkan penulis dimana rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan rendahnya pemahaman

dari masyarakat tentang Musrenbang ini merupakan sebagian permasalahan yang akan berdampak pada penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam upaya mewujudkan pembangunan di Desa Mapin Rea.

1.2.Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam upaya mewujudkan pembangunan di Desa Mapin Rea ?
- 1.2.2. Apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan pembangunan di Desa Mapin Rea?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan pembangunan di Desa Mapin Rea.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan pembangunan di Desa Mapin Rea.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara umum.
2. Hasil penelitian ini dapat memotivasi peneliti yang lain untuk mengungkapkan permasalahan yang ada di Desa Mapin Rea.

1.3.2.2. Manfaat Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat
Dapat mengarahkan masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa
2. Bagi Pemerintah
Untuk pemerintah diharapkan mampu melaksanakan pemabngunan desa seefektif mungkin.
3. Bagi Desa Mapin Rea
Sebagai contoh untuk desa-desa lain dalam hal pembangunan desanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu tujuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji Penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan ini diantaranya:

1. Sunarti (2015) melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. hasil dari penelitian ini kemampuan daya dukung dapat bersumber dari pemerintah pusat, kota, provinsi atau, dapat diusahakan dengan melalui swadaya masyarakat yang berupa uang, tenaga dan sebagainya Sehingga dalam pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik. Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama ingin meneliti tentang Musrenbang dan jenis penelitian kualitatif.
2. Hania Hanafie (2015) melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Perspektif Effective Governance (Studi pada Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten). Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pamulang tentang efektivitas pelaksanaan musrenbang perspektif effective governance bahwa efektivitas pelaksanaan musrenbang perspektif kinerja dapat dikategorikan sedang,

Partisipasi publik tinggi sedangkan perspektif akuntabilitas masih rendah. Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama ingin mengetahui tentang tingkat efektivitas pelaksanaan musrenbang dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

3. Kevin Tio Prasetio, Imam Surya, dan NurHasanah (2018) melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Tingkat Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan program Prioritas pembangunan fisik hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2016 dapat dilihat belum efektif sepenuhnya karena dalam realisasinya masih ada beberapa kegiatan atau program yang tidak berjalan dan tidak tepat sasaran serta waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama meneliti tentang efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan tingkat desa dan metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif.
4. A.M Dirga Firgiawan (2018) melakukan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng terwujud dalam hal menghadiri, menyampaikan usulan mereka, dan melaksanakan kegiatan bersih-bersih

faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat di kelurahan malilingi kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yaitu tokoh masyarakat yang selalu mengingatkan dan menggugah kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Relevansi dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama ingin meneliti tentang Musyawarah perencanaan pembangunan dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

5. Ismiyana (2018) melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan. jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. hasil dari penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah dan masyarakat hanya sebatas menghadiri tapi tidak aktif menyampaikan gagasan-gagasan dan saran sarannya. Relevansi dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas musrenbang.

Tabel 2.1

1.	Nama Peneliti	Sunarti (2015)
	Judul	Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu
	Metode Penelitian	Penelitian kualitatif
	Hasil	Efektivitas pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Besusu Tengah pada pelaksanaannya dikategorikan cukup baik, dengan melihat tiga aspek yang dijadikan tolak ukur, yaitu meliputi pencapaian tujuan, bahwa dalam pencapaian tujuan terdapat beberapa usulan-usulan yang kurang diakomodir, sehingga dalam proses musrenbang dikatakan kurang baik menuju pencapaian tujuan musrenbang itu sendiri. Aspek integrasi, bahwa dari banyaknya usulan-usulan yang ada dapat disatukan dari beberapa usulan-usulan yang ada, dan menjadi salah satu program yang diprioritaskan sehingga dalam hal ini dikatakan cukup baik. Dan pada aspek adaptasi dapat kemampuan daya dukung dapat bersumber dari pemerintah pusat, kota, provinsi atau dapat diusahakan melalui swadaya masyarakat yang berupa uang, tenaga dsb.
	Relevansi	Meneliti tentang efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dan menggunakan jenis penelitian kualitatif
	Critical Point	Tidak dijabarkannya tinjauan pustaka secara jelas dan kurang penjelasan teori operasionalnya.
2	Nama Peneliti	Hania Hanafie (2015)

	Judul	Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Perspektif Effective Governance (Studi pada Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten)
	Metode Penelitian	Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif
	Hasil	Efektivitas pelaksanaan musrenbang perspektif kinerja dapat dikategorikan sedang, Partisipasi publik tinggi sedangkan perspektif akuntabilitas masih rendah. Penelitian ini melihat bahwa terdapat koordinasi yang kurang dari pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan adanya intervensi dalam pelaksanaan hasil Musrenbang oleh politisi (anggota DPRD).
	Relevansi	Meneliti tentang efektivitas pelaksanaan Musrenbang
	Critical Point	Tidak terdapatnya definisi konseptual dan definisi operasional yang dipaparkan jelas dalam kerangka berfikir.
3	Nama Peneliti	Kevin Tio Prasetyo, Imam Surya, dan NurHasanah (2018)
	Judul	Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Tingkat Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara
	Metode Penelitian	penelitian deskriptif kualitatif

	Hasil	Dalam pelaksanaan kegiatan program Prioritas pembangunan fisik hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2016 dapat dilihat belum efektif sepenuhnya karena dalam realisasinya masih ada beberapa kegiatan atau program yang tidak berjalan dan tidak tepat sasaran serta waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada
	Relevansi	Meneliti efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan tingkat desa
	Critical Point	Tidak dijabarkan Kajian pustaka, yang menjelaskan konsep variabel yang di teliti
4	Nama Peneliti	A.M Dirga Firgiawan (2018)
	Judul	Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
	Metode Penelitian	Penelitian kualitatif
	Hasil	Partisipasi masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng terwujud dalam hal menghadiri, menyampaikan usulan mereka, dan melaksanakan kegiatan bersih-bersih faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat di kelurahan malilingi kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yaitu tokoh masyarakat yang selalu mengingatkan dan menggugah kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang.
	Relevansi	Meneliti Musyawarah perencanaan pembangunan

		(Musrenbang)
	Critical Point	Metode penelitian dijabarkan secara jelas dan tidak memiliki Kerangka berfikir
5	Nama Peneliti	Ismiyana (2018)
	Judul	Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan
	Metode Penelitian	Penelitian kualitatif
	Hasil	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah dan masyarakat hanya sebatas menghadiri tapi tidak aktif menyampaikan gagasan-gagasan dan saran sarannya
	Relevansi	Meneliti tentang Musrenbang
	Critical Point	Tidak terdapatnya definisi operasional yang dipaparkan jelas dalam kerangka berfikir kurangnya teori yang dijabarkan dalam landasan teorinya.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Definisi Efektivitas

Menurut Sumaryadi (2005:105) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. Sedangkan menurut Siagian (2003:20). Efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya manusia, dana ,sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu dapat tepat pada waktunya.

Efektivitas menurut Limbong (2017:10) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa mutu tertentu tepat pada waktunya.

Menurut Ducan (Steers,2005:53) mengemukakan mengenai ukuran efektivitas yaitu:

- a. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan pencapaian yang dipandang melalui suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan pentahapan dalam arti periodenisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan merupakan target yang kongkret.

- b. Integritas yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integritas menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi merupakan kemampuan organisasi serta individu – individu yang ada didalamnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Starman (Kunarjo, 2002:126) efektivitas organisasi dalam suatu program pembangunan ditentukan oleh adanya faktor-faktor pendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa: (1) peranan pendamping, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) kemampuan kelompok sasaran.

a. Peranan pendamping

Menurut Starman (Kunarjo, 2002: 126) peranan pendamping dalam pengembangan kelompok sasaran yaitu : (1) membantu kelompok sasaran untuk memperkuat dinamika intern dengan memantapkan aspek keorganisasian (2) membantu mengidentifikasi berbagai kemungkinan atau potensi lingkungan terdekat yang dapat dikelola sebagai usaha produktif (3) sebagai penghubung antara kelompok sasaran dengan berbagai potensi yang termanfaatkan dari luar.

b. Partisipasi masyarakat

Partisipasi sudah menjadi bahasa yang umum dan sangat terkenal sejak dulu, partisipasi menjadi suatu hal yang harus didorong. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja karena dana pemerintah terbatas jika dibandingkan dengan keinginan membangun. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengetahui apa kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

c. Kemampuan kelompok sasaran

Menurut Dunn (2002:162) mengemukakan bahwa kelompok sasaran (*target group*) adalah orang masyarakat atau organisasi yang kepada mereka suatu kebijakan atau program diharapkan memberikan akibat. Masyarakat selaku kelompok sasaran diharapkan menjadi pihak yang secara jelas guna memobilisasi sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat.

2.2.3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pembangunan

Program pembangunan berasal dari adanya suatu kebijakan. Jadi program tertentu akan membahas mengenai kebijakan yang mendasari lahirnya program tersebut. Menurut Peters (Tangkilisan, 2003:22) mengemukakan bahwa faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan, yaitu : (1) kurang informasi, (2) isi atau tujuan kebijakan tidak jelas, (3) pelaksanaannya tidak memperoleh dukungan yang cukup, (4) pembagian tugas dan wewenang yang tidak jelas.

Dalam konsep efektivitas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun menurut Sutrisno (2011:125) terdapat empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi yaitu:

- a. Karakteristik organisasi
- b. Karakteristik lingkungan
- c. Karakteristik karyawan
- d. Kebijakan praktik manajemen

2.2.4. Kriteria Efektivitas

Kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak telah dijelaskan oleh Siagian (2001:24) yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasaran karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.2.5. Definisi Pembangunan

Menurut Siagian (2003) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana rencana

pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Budiman (2002:2) berpendapat bahwa pembangunan dapat diukur dengan beberapa standar yaitu:

- a. Kekayaan rata-rata, pembangunan mula-mula digunakan dalam arti pertumbuhan ekonomi. Dimana semua masyarakat menilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara-negara tersebut setiap tahunnya.
- b. Pemerataan, segera menjadi jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksi oleh bangsa yang tidak berarti, bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. bisa terjadi, sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan melimpah, sedangkan sebagian besar penduduk di dalam kemiskinan.
- c. Kualitas hidup, Salah satu cara mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality Of Life Index), yang mengukur 3 indikator yakni: rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, rata-rata persentasi buta dan melek huruf.

- d. Kerusakan lingkungan, sebuah negara yang produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin.
- e. Keadilan sosial dan kesinambungan, tolak ukur pembangunan yang berhasil yang semulanya hanya memberikan tekanan terhadap tingkat produktivitas ekonomi suatu negara, kini menjadi semakin kompleks.

Menurut Suryono (2010:4) adapun unsur – unsur yang terkandung didalam pembangunan yaitu :

1. Perubahan yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan.
2. Tujuan yaitu yang diarahkan dari, oleh dan untuk rakyat menuju pelestarian, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang lebih baik.
3. Potensi yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Menurut Suryono (2010:53) tinjauan terhadap konsep pembangunan dapat dikaji dari dua aspek penting yaitu :

1. Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, yang diberi awalan pem dan akhiran an, guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun setidaknya – tidaknya mengandung 4 arti yaitu : (1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologis), (2) bangun dalam arti bangkit atau

berdiri (aspek perilaku), (3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan atau membina (gabungan aspek fisiologis, aspek perilaku dan aspek bentuk).

2. Secara Ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogkan dengan konsep :

1. Konsep pertumbuhan (growth), adalah konsep ekonomi, lengkap ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan berarti kenaikan pendapatan nasional nyata jangka panjang waktu tertentu. Rostow dalam *The Stages Of Economic Growth* Membentangkan teorinya yang terkenal tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dari: Tahap masyarakat tradisional, Tahap tinggal landas dan Tahap pematapan (pedewasaan) serta Tahap konsumsi masa tinggi.
2. Konsep rekonstruksi ekonomi, adalah upaya pada peningkatan secara luas, melainkan yang lebih dititik beratkan pada Upaya pengembangan kembali perekonomian suatu negara.
3. Konsep Modernisasi, adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industry di Inggris
4. Konsep westernisasi, adalah analog modernisasi, dimana hal ini adalah sebagai upaya pembangunan untuk menandingi Barat atau minimal mencapai taraf kehidupan relativesama dengan yang terdapat di dunia Barat.

5. Konsep Perubahan Sosial, dimana diartikan sebagai perubahan kelembagaan masyarakat yang perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai sosial dan perilaku kelompok.
6. Konsep Pembebasan, yang mengajarkan bahwa pembangunan bermakna sebagai proses penilaian kembali terhadap keadaan setiap kelompok masyarakat dan mengadakan perbaikan baik secara kelompok maupun individu.
7. Konsep Pembaharuan, merupakan salah satu diantara bentuk proses sosial yang erat kaitannya dengan modernisasi dan perubahan sosial.
8. Konsep Pembangunan Bangsa, merupakan salah satu konsep pembangunan multidimensional sebagai bentuk perubahan sosial yang tidak hanya menyangkut pembangunan bangsa saja, tetapi juga pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan, dan pertahanan serta hubungan antara bangsa.
9. Konsep Pembangunan Nasional, konsep ini merupakan di mana tekad untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan lainnya atau setidaknya tekad untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya.
10. Konsep Pengembangan, sering dikaitkan dengan istilah Negara yang sedang berkembang. Berdasarkan pendekatan antropologis negara ini dianalogkan dengan kondisi masyarakat primitive yang kemudian diubah menjadi masyarakat sederhana.

11. Konsep Pembinaan, merupakan proses pembongkaran pola pikir lama yang dianggap keliru, yang selama itu mengendalikan diri bagi yang bersangkutan. Upaya ini dapat disebut semacam cuci gudang intelektual.
12. Konsep Pembangunan, dianggap sebagai perubahan sikap hidup yang semakin rasional dan penerapan teknologi yang semakin meningkat.
13. Konsep Pembangunan Nasional Indonesia sebagai model analisis menunjukkan bahwa pembangunan Nasional Indonesia merupakan amanat konstitusi Undang-undang Dasar dan GBHN yang didalamnya tertuang tentang cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional. dengan demikian secara metodologis aspek-aspek penting yang tersurat dan tersirat dalam pembangunan nasional Indonesia setidaknya tidaknya memiliki ideologi pembangunan (Pancasila) hakikat pembangunan (pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia) dan strategi pembangunan (Trilogi pembangunan: stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial).

2.2.6. Definisi Perencanaan Pembangunan

Dwidjowijoto (2003:67) mengemukakan bahwa "perencanaan yang baik dapat diidentikkan dengan sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya tinggal melaksanakan dan mengendalikan". sepanjang pelaksanaan konsisten dan pengendaliannya efektif maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menunggu waktu untuk sampai ke tujuan.

Herujito (2001:84) mengemukakan bahwa "perencanaan adalah keputusan terhadap apa yang akan dilakukan di kemudian hari". perencanaan berisi perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.

Menurut Nugroho (2011:81) bahwa suatu perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. Sistematis yaitu setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) musrenbang yang berlaku.
- b. Terpadu yaitu Setiap unsur perencanaan yang ada dalam musrenbang memiliki keterkaitan saling mendukung antara rencana yang ada dan program yang dimiliki dan disusun oleh SKPD penanggung jawab.
- c. Transparan yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh masing-masing peserta musrenbang mulai dari usulan-usulan, kuantitas kualitas dan biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas tersebut perlu direalisasikan
- d. Akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan. setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam musrenbang seperti usulan-usulan prioritas dari masyarakat, hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari musrenbang tersebut.

Sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2004 dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan

pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok.

Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan Sinergi antara daerah, ah waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah
- c. Menjamin keterkaitan dan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

Menurut Lincoln (2001) dalam Sjafrizal (2016:30) jenis perencanaan pembangunan menurut jangka waktu dalapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10 sampai 25 tahun rencana jangka panjang biasanya disebut juga sebagai perencanaan perspektif yang berisikan arah pembangunan secara umum. dengan kata lain, perencanaan jangka panjang berisikan pandangan jauh kedepan tentang kerangka pembangunan yang disusun Dengan aspirasi masyarakat secara umum. Karena karena itu, perencanaan jangka panjang lebih bersifat menyeluruh dan tidak sampai kepada program dan kegiatan secara rinci sedangkan aspek yang dibahas meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, dan tata ruang. Disamping itu dalam perencanaan jangka panjang juga mencangkup pentahapan

pembangunan untuk masing-masing periode 5 tahun. Hal ini perlu dilakukan agar perencanaan jangka panjang tersebut dapat menjadi acuan terhadap penyusunan perencanaan jangka menengah.

- b. Perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka menengah biasanya mencakup 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan pada dasarnya merupakan perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Perencanaan jangka panjang berisikan perumusan kerangka ekonomi makro, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang disusun berdasarkan visi dan misi presiden atau kepala daerah terpilih. Disamping itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
- c. Perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga seringkali juga dinamakan sebagai rencana tahunan. rencana ini pada dasarnya merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. karena itu, rencana

tahunan ini selanjutnya tidak dijadikan dasar utama dalam penyusunan pendapatan dan belanja baik pada tingkat nasional (RAPBN) maupun tingkat daerah (RAPBD). Rencana tahunan yang mencakup ke semua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan khusus untuk sektor atau bidang dinamakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

2.2.7. Definisi Musrenbang

Musrenbang adalah forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan di laksanakan. proses Musrenbang memajukan setiap daerah dimulai dari Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi hingga Pusat menurut Kimpraswil (2009:2).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Sumbawa No 6 tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Musrenbang telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa, bersama dengan penerbitan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan untuk Musrenbang desa dinyatakan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 pasal 1 ayat (9), yang menyebutkan bahwa Musrenbang desa adalah forum tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

Dasar pelaksanaan Musrenbang adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai implementasi dari Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Musrenbang dilaksanakan secara bertingkat dari tingkat desa, Kecamatan, SKPD dan Kabupaten Tujuan Musrenbang.

Dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 Bab II pasal 3 ayat (1) yang berisi Musrenbang Desa bertujuan untuk :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya.
- b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan yang pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Provinsi.

2.2.8. Keluaran Musrenbang

Dalam buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Desa Luaran atau hasil dari Musrenbang Desa adalah

- a. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- b. Daftar prioritas masalah yang ada di desa untuk disampaikan di Musrenbang Kecamatan
- c. Daftar nama TimDelegasi desa yang akan mengikuti Musyawarah Pembangunan (musrenbang) kecamatan (terdiri dari 3 orang atau 5 orang; apabila 3 orang, yang minimal 1 perempuan; bila 5 orang minimal 2 perempuan).

2.2.9. Partisipasi Masyarakat

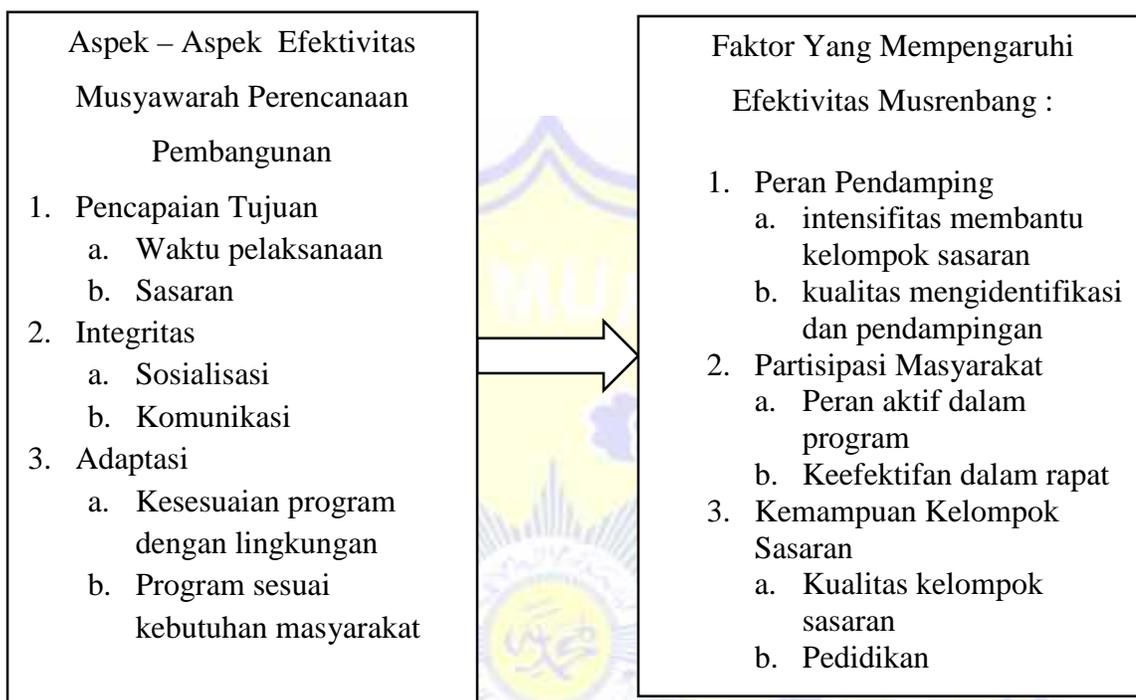
Menurut Adisasmita (2006) partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan perlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Adisasmita juga mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien yaitu sebagai berikut: 1. Aspek masukan atau input (Sumber daya manusia, dana, sarana, data, rencana dan teknologi. 2. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan 3 Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

2.3. Kerangka Berfikir

Menurut Starman (Kunarjo, 2002:126) efektivitas organisasi dalam suatu program pembangunan ditentukan oleh adanya faktor-faktor pendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa: (1) peranan pedamping, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) kemampuan kelompok sasaran. Selain pengukuran tersebut adapun aspek Menurut Ducan (Steers, 2005:53) mengemukakan mengenai ukuran efektivitas yaitu: (1) Pencapaian tujuan (2) Integritas (3) Adaptasi.

Gambar 2.3. Kerangka Berfikir Peneliti



2.3.1. Definisi konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini, sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya dilapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Untuk itu, dalam memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sesuai dengan isi kerangka teori

peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini, adalah :

1. Aspek Efektivitas Musrenbang

Menurut Ducan (Steers,2005:53) mengemukakan mengenai ukuran efektivitas yaitu:(1) Pencapaian tujuan (2)Integritas (3)Adaptasi.

2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang

Menurut Starman (Kunarjo, 2002:126) efektivitas organisasi dalam suatu program pembangunan ditentukan oleh adanya faktor-faktor pendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa: (1) peranan pedamping, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) kemampuan kelompok sasaran.

2.3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan penelitian menggunakan variabel yang sama. Selain itu definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur atau melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka berfikir peneliti, yaitu :

1. Aspek-aspek efektivitas Musrenbang

1. Pencapaian Tujuan

- a. Waktu pelaksanaan
- b. Sasaran

2. Integritas

- a. Sosialisasi
- b. Komunikasi

3. Adaptasi

- a. Kesesuaian program dengan lingkungan
- b. Program sesuai kebutuhan masyarakat

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas :

1. Peran Pendamping

- a. intensifitas membantu kelompok sasaran
- b. kualitas mengidentifikasi dan pendampingan

2. Partisipasi Masyarakat

- a. Peran aktif dalam program
- b. Keefektifan dalam rapat

3. Kemampuan Kelompok Sasaran

- a. Kualitas kelompok sasaran
- b. Pendidikan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2018).

Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa yang terjadi pada saat peneliti sedang melakukan penelitian di lokasi. Kemudian menganalisisnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di teori dan selanjutnya menarik kesimpulan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan di Desa Mapin Rea. Disamping itu juga akan dibahas tentang faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program tersebut.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa Mapin Rea. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin melihat sejauh mana efektivitas Musrenbang yang dilaksanakan di desa Mapin Rea. Alasan lain yaitu ingin melihat sejauh mana pelaksanaan musrenbang tingkat desa perlu dikaji demi tercapainya tujuan Musrenbang itu sendiri agar pembangunan di desa Mapin Rea semakin meningkat.

3.3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, sampling dimana penelitian dilakukan dengan kriteria yang sudah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Patilama, 2013). Selain itu menurut Patilama (2013:12), informan Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subjek peneliti. Adapun subjek penelitian yang diambil Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa Mapin Rea
2. Sekretaris desa Mapin Rea
3. Staf desa Mapin Rea
4. Masyarakat desa Mapin Rea

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau nomor sumber yang berkaitan dengan variabel penelitian atau efektivitas musrenbang desa. Metode yang digunakan adalah wawancara (interview) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintahan desa, daftar program pembangunan desa.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2018:62). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh Sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, jam dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono,2018).

b. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono,2018)mendefinisikan bahwa interview atau wawancara sebagai berikut,“Interview is a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informan yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. dokumentasi

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018).

3.6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep Milles dan Huberman (Sugiyono, 2018) tahap-tahap Analisis adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Peneliti akan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan wawancara di lapangan. Seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing. Data yang sudah terkumpul dapat diringkas atau dirangkuman yang akan dianalisis dan dijadikan sebagai data penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun yang direduksi adalah seluruh data mengenai permasalahan yang kemudian dilakukan penggolongan ke dalam dua bagian yaitu: kepala desa dalam memutuskan pelaksanaan program pembangunan dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang. Sementara data-data yang sekiranya tidak ada

hubungannya dengan permasalahan peneliti tidak dimasukkan dalam hasil penelitian agar mudah dalam penarikan kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data yang akan dipergunakan sebagai bahan laporan. Dalam penyajian data ini dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar, keterkaitan secara tabel. penyajian ini memberikan kemungkinan mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir yang dilakukan dengan melakukan verifikasi berupa ulang ulang pada catatan mengenai ulang pada catatan mengenai hal yang terjadi dilapangan sehingga data yang dihasilkan teruji validasinya.

3.7. Uji Validasi Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data keperluan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan melalui sumber yang lainnya.